

Urgensi Pengelolaan Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah

Hendra Naldi¹, Hadiyanto²

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

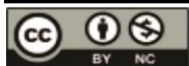
²Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Email: hendranaldi69@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to improve the education qualities in Madrasah (Islamic school) by managing the funding. The background of the study indicates the readiness of madrasah to improve the quality of education through madrasah-based management which seems questionable. Some factors indicating the weakness of the quality of education in madrasah are the problem of the financing management system. Madrasah requires the management of financing because it generally develops and is managed independently. In order to improve the quality of education, madrasah should meet the minimum financing management criteria. The intended financing consists of investment, operating, and personal costs. There are three things the madrasah must do in financing management, including planning, implementing, evaluating and accountability.

Keywords: Management, Education, Quality



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan yang sistematis. Kualitas pendidikan seringkali tertuju pada kualitas lulusan, namun lulusan yang berkualitas tidak dapat tercapai jika tidak melalui tahapan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kualitas dapat ditinjau dari dua sisi, yakni dari segi normatif dan segi deskriptif. Pada artian normatif, kualitas ditentukan dengan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, kualitas pendidikan adalah produk pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar idealnya. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan adalah instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam arti deskriptif, kualitas pendidikan ditentukan

berdasarkan pada hasil tes prestasi belajar (Hamalik, 1990). Kualitas pendidikan merupakan kemampuan sekolah dalam mengelola secara operasional dan efisien aspek-aspek yang berhubungan dengan sekolah sehingga melahirkan nilai lebih terhadap komponen (Dazaujak, 1996). Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi pendidikan dalam pengelolaan seluruh potensi sekolah secara optimal sejak dari tenaga kependidikan, siswa, proses pembelajaran, sarana pembelajaran, keuangan, dan termasuk kaitannya dengan masyarakat luas, sehingga dapat melahirkan *output/outcomes* yang berkualitas.

Pendidikan berpengaruh secara penuh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia, pemerintah Indonesia tidak dapat melepaskan peran serta pihak swasta dan

masyarakat. Saat ini, pendidikan nasional dihadapkan oleh persoalan peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran pendidikan dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional berdasarkan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (Fattah, 2002).

Diketahui bersama bahwa madrasah adalah lembaga kependidikan Islam yang menjadi cerminan kualitas pendidikan umat Islam. Peran dan fungsi madrasah adalah untuk merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan generasinya terdidik, menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah berdiri sejak agama Islam berkembang di Nusantara (Indonesia). Madrasah sudah berkembang dalam arti masyarakat (umum) yang didasarkan oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus, penyempurnaan dan peningkatan kualitas pendidikan madrasah seiring dengan perkembangan dan aspirasi madrasah (Arifin, 2003).

Mayoritas madrasah lahir atas inisiasi tokoh-tokoh masyarakat dan stakeholdernya. Strategi pemberdayaan madrasah tingkat dasar dimaksud sebagai bagian dari program penuntasan wajib belajar, yaitu untuk memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk mendapatkan pendidikan. Strategi dalam memberdayakan madrasah terutama berupa fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan upaya pembangunan madrasah di atas, secara fisik keberhasilannya lebih ditentukan oleh peran birokrat atau aparat pemerintah, akan tetapi keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih kuat tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu sendiri, mengingat bagaimanapun baiknya madrasah, tersedianya peralatan penunjang pembelajaran, apabila guru atau tenaga pengajar tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka risiko kegagalan akan sangat tinggi (Shaleh, 2004).

Agar meningkatnya kualitas madrasah sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat,

maka diperlukan pengelolaan anggaran biaya yang profesional. Oleh sebab itu, madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal. Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi terdiri dari biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh siswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi madrasah terdiri dari: (1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan (3) Biaya operasi pendidikan yang tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dan lain-lain (Khaeruddin & Junaedi, 2007).

PEMBAHASAN

Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Istilah manajemen berasal dari Bahasa Latin, yakni dari asal kata “*manus*” yakni tangan dan “*agree*” yakni melakukan/mengerjakan. Kedua istilah tersebut digabungkan menjadi satu kata kerja *managere* yang berarti menangani. Kemudian *managere* diterjemahkan ke Bahasa Inggris berupa *to manage*, dan kata benda menjadi *management*, istilah *manager* diperuntukkan bagi orang yang melakukan aktivitas manajemen. Istilah *management* diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (Usman, 2006). Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya dengan efektif serta efisien dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan, 2003). Berdasarkan pengertian manajemen tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen memiliki unsur tujuan yang akan dicapai, pertautan antara ilmu dengan seni, proses yang sistematis, terkoordinir, kooperatif, dan terintegrasi. *Management is a difficult enough field without those in it being forced to face confusion and apparent contradiction.* (Koontz & O’Donnel, 1972). Manajemen merupakan sebuah bidang yang

cukup sulit, tanpa pendekatan-pendekatan dalam manajemen seseorang terpaksa harus berhadapan dengan kebingungan dan pertentangan yang nyata.

Terdapat beberapa pendekatan manajemen menurut Luthans sebagaimana yang dikutip oleh Atmodiwirio (2000) di antaranya: (a) Pendekatan proses; (b) Pendekatan kuantitatif; (c) Pendekatan sistem; (d) Pendekatan kontingensi; dan (f) Pendekatan perilaku. Beberapa pendekatan di atas telah melahirkan perbedaan makna manajemen, termasuk makna manajemen pendidikan, di antaranya: (a) manajemen pendidikan memiliki pengertian kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan; (b) manajemen pendidikan memuat pengertian proses dalam mencapai tujuan pendidikan; (c) manajemen pendidikan bisa ditinjau dari kerangka berpikir sistem; (d) manajemen pendidikan juga bisa ditinjau dari segi efektivitas pemanfaatan sumber daya; (e) manajemen pendidikan bisa ditinjau dari segi kepemimpinan; (f) manajemen pendidikan bisa ditinjau dari proses pengambilan keputusan; (g) manajemen pendidikan juga bisa ditinjau dari segi komunikasi; (h) manajemen acapkali diartikan dalam istilah sempit, yakni proses ketatausahaan yang pada dasarnya merupakan aktivitas rutin mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat, serta mempersiapkan laporan (Kosasi, 2000).

Setiap kegiatan dalam proses manajemen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan deskripsikan dalam kurikulum madrasah. Terdapatnya unsur tugas dan fungsi menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas manajemen diperlukan adanya pengorganisasian yang teratur dan terstruktur. Setiap orang yang ikut serta harus diorganisir sedemikian rupa sehingga mereka memiliki tanggung jawab dan kesempatan, serta hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kegiatan tersebut memerlukan adanya koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan manajerial yang baik.

Manajemen sekolah adalah bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan. Sementara itu, manajemen

kurikulum adalah komponen dari manajemen aspek-aspek sekolah. Fungsi manajemen pada dasarnya adalah peran pokok yang wajib dilaksanakan oleh suatu pimpinan organisasi (Syamsi, 1994).

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan sejak dari perencanaan sampai pembuatan pertanggungjawaban oleh bendahara sekolah, dalam hal manajemen biaya pendidikan harus memperhatikan pendekatan sistem yang dikenal dengan istilah *Planning Programing Budgeting Systems* (PPBS), istilah ini kemudian diganti dengan istilah Sistem Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA). Untuk melakukan pendekatan sistem tersebut maka bendahara di bawah pengawasan kepala madrasah harus menjalankan tugas manajemen yang meliputi; perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), penatausahaan (*organizing*), pengawasan (*controlling*), dan pertanggungjawaban (*reporting*). Jika tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal maka akan dipastikan biaya pendidikan yang didapat, digunakan, dan dikeluarkan akan terkelola dengan akuntabel dan transparan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui mengapa manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi (termasuk sekolah) dalam semua level, mengingat tanpa manajemen yang baik, segala jenis usaha yang dilakukan akan sia-sia dan amat sulit mencapai tujuan. Dengan demikian, kebutuhan akan manajemen yang baik adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, terdapat 3 (tiga) alasan manajemen sangat diperlukan, yakni: (1) Manajemen diperlukan agar mencapai tujuan organisasi dan pribadi; (2) Manajemen diperlukan untuk mengawal keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan; (3) Manajemen diperlukan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

Problematika Pendidikan di Madrasah

Keuangan adalah sumber daya yang secara langsung mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses pendidikan. Kebijakan otonomi daerah yang berlangsung sejak awal 2000-an juga berimplikasi pada aspek pendidikan, salah satunya adalah mengenai kewenangan lebih yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada institusi pendidikan untuk mengelola dananya sendiri.

Kepala madrasah selaku pimpinan mempunyai tanggung jawab keuangan madrasah. Oleh sebab itu, kepala madrasah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan madrasah tersebut. Untuk itu, kepala madrasah dituntut mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan madrasah yang efektif dan efisien (Mulyasa, 2005).

Manajemen keuangan madrasah adalah bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan mengharuskan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggung jawabkan penggunaannya secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan madrasah harus dilakukan untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa.

Hingga saat ini banyak madrasah mengalami kesulitan dalam hal sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga kependidikan dan kemampuan yang tidak memadai dalam memberikan imbalan kepada tenaga kependidikan. Terdapat beberapa kasus tenaga pendidikan yang menjalankan tugas tidak berdasarkan bidang keahlian dan pengalamannya, hal ini berimplikasi pada kualitas pendidikan di madrasah semakin tertinggal. Pada kondisi tersebut, kesiapan dan kelayakan madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui manajemen berbasis madrasah seperti halnya harus dipertanyakan (Yusuf, 2006).

Manajemen untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Implementasi manajemen pendidikan seharusnya berorientasi pada efektivitas terhadap segala aspek pendidikan, baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahannya. Berikut ini adalah urgensi manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas madrasah:

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan

Berdasarkan otonomi pengelolaan pendidikan di lingkungan madrasah maka peran pemerintah bergeser dari regulator menjadi fasilitator. Keikutsertaan pemerintah

dalam penyelenggaraan pendidikan hanya mencakup 2 (dua) aspek, di antaranya kualitas dan pemerataan pendidikan. Pemerintah telah menetapkan standar kualitas pendidikan, dan berupaya supaya semua siswa dapat berprestasi. Pemerintah juga telah berupaya agar semua madrasah mencapai standar minimal kualitas pendidikan, dengan keragaman prestasi siswanya. Pemerintah juga telah menjamin pemerataan peluang bagi seluruh siswa dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan keluasaan otonomi sekolah untuk menentukan kualitas masing-masing satuan pendidikan (Hadiyanto, 2004). Hal ini dilakukan melalui perumusan kebijaksanaan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara reguler. Alokasi dan distribusi anggaran pendidikan harus menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi.

Pertama, komponen pengelolaan proses pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, “pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha mengarahkan munculnya perilaku belajar, atau dengan istilah lain usaha untuk membelajarkan pembelajar (Muhammad, 2008). Pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar (Hasibuan & Moedjiono, 2010).

Terdapat beberapa peranan madrasah dalam proses pembelajaran di antaranya: 1) Memberikan kecerdasan pikiran dan memberi pengetahuan; 2) Memberikan spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran; 3) Memberikan pendidikan dan pengajaran yang lebih efisien kepada masyarakat; 4) Membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial; 5) Menjaga nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan kebudayaan tersebut; dan 6) Melatih seseorang untuk dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sebelum terjun ke tengah masyarakat (Ramayulis, 2003). Madrasah diberi kesempatan untuk memilih strategi pembelajaran yang paling tepat, berdasarkan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan

kondisi lingkungan dan sosial terdapat di madrasah. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran yang menciptakan suasana keaktifan dan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa.

Kedua, perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Madrasah mempunyai kewenangan dalam melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud seperti kebutuhan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Terdapat beberapa rencana yang perlu disusun oleh madrasah dalam konteks pendidikan yakni: 1) Perumusan tujuan yang akan dicapai; 2) Penentuan fungsi unit sebagai bagian yang akan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan; 3) Menetapkan kebutuhan waktu yang diperlukan; 4) Menetapkan metode atau cara penyampaian tujuan; 5) Menetapkan instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan; 6) Merumuskan rencana evaluasi dan penilaian dalam mengukur tingkat pencapaian tujuan; dan 7) Menetapkan jumlah atau sumber dana yang diperlukan (Sabri, 2000).

Kepala Madrasah wajib melakukan analisis kebutuhan kualitas, berdasarkan hasil analisis tersebut Kepala Madrasah kemudian membuat rencana peningkatan kualitas. Selain itu madrasah juga diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi, terkhusus evaluasi secara internal. Evaluasi pembelajaran ditujukan pada aspek sistem pembelajaran yang mencakup perilaku awal siswa, kemampuan guru, kurikulum dan administratif (Sumiati & Asra, 2007). Secara internal evaluasi dilaksanakan oleh warga madrasah melalui proses pemantauan.

Ketiga, pengelolaan kurikulum pembelajaran di madrasah. Komponen penting dalam yang dapat menunjang kualitas pendidikan adalah adanya kurikulum. Kurikulum madrasah dibuat oleh madrasah sebagai suatu pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas (Sudjana, 2008). Melalui rancangan kurikulum yang baik, maka kualitas pendidikan akan mudah dicapai. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan berkewajiban membuat kurikulum sebagai sebuah instrumen untuk mendapatkan *output*

pendidikan yang berkualitas. Madrasah mempunyai peluang untuk memperkaya dan memperdalam kurikulum berdasarkan potensi yang terdapat di sekitar madrasah yang selaras dengan karakteristik siswa. Selain itu, madrasah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

Keempat, pengelolaan tenaga pendidik. Reformasi dalam pengelolaan pendidikan mengarah kepada terwujudnya desentralisasi pendidikan, baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan madrasah. Hal ini terwujudkan dengan adanya kewenangan yang luas di tingkat daerah dalam pengelolaan pendidikan, termasuk madrasah dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2008). Kepala Madrasah perlu melakukan pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, *reward* dan sanksi, hubungan kerja, hingga evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah bisa dilaksanakan oleh madrasah kecuali yang berhubungan dengan imbalan jasa dan rekrutmen guru, yang hingga saat ini masih ditangani oleh institusi yang lebih tinggi (Bahtiar, 2009).

Kelima, pengelolaan fasilitas Pendidikan di madrasah. Pengelolaan fasilitas sudah sewajarnya dilakukan oleh madrasah, mulai dari pengadaan sarana, pemeliharaan dan perbaikan, hingga pada pengembangan. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa madrasah yang paling tahu kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Pada dasarnya madrasah yang berstatus negeri keseluruhan pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan difasilitasi oleh pemerintah, sementara madrasah yang berstatus swasta tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana yang diterima oleh madrasah negeri. Minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah membuat kepala madrasah harus melakukan strategi dan usaha pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Keenam, pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian anggaran sudah sepantasnya dilakukan oleh Kepala Madrasah secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.

Hal ini juga didasarkan oleh kenyataan bahwa madrasah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian anggaran sudah seharusnya diberikan ke madrasah. Madrasah juga seharusnya diberikan keleluasaan untuk melakukan aktivitas yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

Ketujuh, pelayanan kepada siswa. Pelayanan kepada siswa harus dilakukan secara optimal mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan dalam pendidikan, proses kenaikan kelas, penempatan untuk melanjutkan pendidikan (Hadiyanto, 2013), hingga pada usulan masuk perguruan tinggi favorit. Hal demikian sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak madrasah, namun yang diperlukan adalah peningkatan intensitasnya.

Kedelapan, hubungan madrasah dengan masyarakat. Pembinaan hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Hubungan madrasah dengan masyarakat sejak dulu sudah didesentralisasikan. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas hubungan tersebut.

Kesembilan, pengelolaan suasana madrasah. Suasana madrasah yang kondusif dalam peningkatan akademik merupakan indikator bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif. Lingkungan madrasah yang tertib dan aman disertai dengan harapan tinggi dari warga madrasah untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan madrasah, dan aktivitas yang terpusat pada siswa merupakan contoh iklim madrasah yang bisa memunculkan semangat belajar siswa.

Manajemen Pembiayaan

Pertama, perencanaan. Suatu organisasi atau lembaga apapun sebelum melangkah jauh untuk mencapai tujuan, maka harus terlebih dahulu merancang perencanaan yang matang. Perencanaan pada suatu organisasi merupakan hal penting dan substansial, mengingat pada dasarnya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Tanpa ada perencanaan yang matang,

maka akan sulit untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan (Syaefudin, Sa'ud, & Makmun, 2005). Terdapat 4 (empat) langkah dasar perencanaan, di antaranya: (1) Tahapan menentukan tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas maka sebuah organisasi akan kehilangan haluan hingga pada penggunaan sumber daya secara tidak efektif; (2) Merumuskan situasi saat ini, pemahaman akan kondisi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai merupakan hal penting, mengingat tujuan dan perencanaan menyangkut pada waktu yang akan datang; (3) Mengidentifikasi peluang kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan. Hal ini perlu diidentifikasi untuk mengukur kekuatan dalam mencapai tujuan, oleh sebab itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat mendukung ketercapaian tujuan; dan (4) Mengembangkan perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir atau pengembangan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan (Handoko, 2003).

Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kegiatan, di antaranya: (1) Penerimaan keuangan madrasah dari berbagai sumber perlu untuk dibukukan berdasarkan langkah pengelolaan yang telah disepakati, baik secara konsep teoritis maupun peraturan dari pemerintah. Secara konsep teoritis banyak alternatif pendekatan yang bisa digunakan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi secara peraturan pemerintah termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah terdapat beberapa karakteristik yang identik; (2) Pengeluaran madrasah berhubungan dengan pembayaran keuangan madrasah untuk keperluan seperti tenaga administrasi, guru, perlengkapan dan fasilitas lainnya. Dalam manajemen pengelolaan keuangan madrasah, pengeluaran keuangan harus dibukukan berdasarkan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan yang telah disepakati (Mulyasa, 2005).

Ketiga, pertanggungjawaban dan evaluasi. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan pada tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia (Wahjosumidjo, 2008).

Pengawasan keuangan madrasah wajib dilakukan melalui aliran masuk dan keluarnya anggaran yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal ini dilakukan dari proses keputusan pengeluaran anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang. Langkah pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya normatif administratif yang berarti bahwa pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian, aspek realistik penggunaan sangat sulit diukur secara obyektif. Persoalan demikian sering terjadi pada setiap madrasah. Hal ini disebabkan oleh belum berfungsinya administrasi keuangan di mana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsinya. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan madrasah dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan semester.

Orientasi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Madrasah

Kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dalam segi pengelolaan maupun dalam segi proses pendidikan itu sendiri, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor *input* agar menghasilkan *output* setinggi-tingginya (Tilaar, 1993). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan terletak pada tiga hal, yakni kualitas pada manajemen, kualitas pada proses dan kualitas pada hasil.

Pendidikan yang berkualitas dapat diidentifikasi melalui ciri berikut, di antaranya: (1) Berfokus pada pelayanan terhadap siswa; (2) Berfokus pada usaha mencegah masalah yang timbul, melalui komitmen untuk bekerja dengan benar dari awal; (3) Mempunyai investasi pada sumber daya manusia, sehingga terhindarkan dari berbagai goncangan psikologi yang sulit diperbaiki; (4) Memiliki taktik dan strategi dalam mencapai kualitas, baik pada tingkat pimpinan, tenaga akademik pendidikan, maupun tenaga administratif pendidikan; (5) Mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik dalam mencapai kualitas, serta meletakkan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat sesuatu yang benar pada masa depan; (6) Memiliki kebijakan pada perencanaan dalam

mencapai kualitas, baik pada target jangka pendek, target jangka menengah maupun target jangka panjang; (7) Mempunyai proses perbaikan dengan melibatkan semua orang berdasarkan tugas pokok, peran dan tanggung jawabnya masing-masing; (8) Mendorong orang yang untuk mempunyai kreativitas, menciptakan kualitas dan merangsang mereka agar dapat bekerja secara berkualitas dan efektif; (9) Mempertegas peran dan tanggung jawab setiap komponen, termasuk ketepatan arah kerja secara vertikal dan horizontal; (10) Mempunyai strategi dan kriteria evaluasi yang tepat dan jelas; (11) Memposisikan kualitas yang telah dicapai sebagai model untuk memperbaiki kualitas layanan lanjutan; (12) Melihat kualitas sebagai bagian dari budaya kerja; dan (13) Menempatkan usaha peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu kewajiban (Sallis, 2007).

Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai masukan (*input*), seperti pengembangan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana sekolah, dukungan administrasi, dan sumber daya lainnya. Kualitas dalam hal hasil pendidikan berpangkal pada hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademik maupun *non-akademik*. Prestasi sekolah juga dapat berupa kondisi yang tidak dapat disentuh namun dapat dirasakan seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan menghargai, kebersihan dan lain sebagainya.

Kinerja sekolah dapat diukur melalui kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas lingkungan kerja serta moral kerjanya. Berkaitan dengan kualitas *output* madrasah, dapat dijelaskan bahwa *output* madrasah dikatakan berkualitas apabila prestasi madrasah, khususnya prestasi siswa menunjukkan capaian yang tinggi dalam hal: (1) Prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, keikutsertaan pada lomba akademik; dan (2) Prestasi *non-akademik*, berupa kualitas spiritual dan sosial siswa seperti kuatnya nilai kejujuran, kesopanan, semangat olahraga, kesenian, atau kemampuan tambahan tertentu seperti: kemampuan mengoperasikan

komputer, beragam jenis teknik, dan jasa (Mulyasa, 2005).

Pelaksanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang menunjang atas terlaksananya pendidikan, antara faktor satu dengan faktor lainnya saling terkait dan melengkapi dalam menunjang keberhasilan pendidikan (Wijaya, 1988). Lima faktor tersebut adalah: (1) Faktor tujuan, kualitas suatu lembaga pendidikan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai sesuatu yang diharapkan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah seharusnya berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan *output* yang berkualitas. Tujuan adalah faktor penting yang harus dijadikan landasan dalam pelaksanaan pendidikan nasional maupun intruksional; (2) Faktor guru, merupakan faktor penentu dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan, hal ini dikarenakan guru sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pendidikan; (3) Faktor siswa, merupakan obyek sekaligus subyek dari pendidikan, sehingga kualitas pendidikan yang akan dicapai tidak akan terlepas dari ketergantungan terhadap kondisi fisik dan tingkah laku serta minat dan bakat siswa; (4) Faktor alat, merupakan segala upaya atau tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Sesuatu yang dapat memenuhi pencapaian tujuan pendidikan dikategorikan sebagai alat pendidikan, yakni sarana, prasarana dan kurikulum; dan (5) Kerjasama, mengadakan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah. Kemajuan pendidikan sedikit banyak ditentukan oleh masyarakat, termasuk orang tua siswa, oleh sebab itu tanpa adanya bantuan dan kesadaran masyarakat sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, mengingat hubungan antara keduanya adalah saling membutuhkan satu sama lain. Hal yang harus dilakukan adalah mengadakan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kerjasama tersebut masyarakat dapat memberikan sumbangsih pemikiran maupun materi atas penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas.

SIMPULAN

Sebagai lembaga pendidikan, madrasah membutuhkan manajemen keuangan yang efektif, agar memenuhi harapan-harapan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang profesional baik dalam pemasukan maupun pendistribusian dana menjadi tolak ukur dalam mencapai lembaga pendidikan yang transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal. Pembiayaan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

Agar dapat melaksanakan manajemen pembiayaan yang efektif, setidaknya terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh pengelola madrasah, diantaranya meliputi: (1) Tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan kemudahan, menemukan kekuatan, mengidentifikasi kelemahan serta hambatan, dan mengembangkan perencanaan atau serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan akhir dalam proses perencanaan; (2) Pelaksanaan dapat dikelompokkan ke dalam dua aktivitas berupa aktivitas penerimaan dan aktivitas pengeluaran; dan (3) Evaluasi dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Atmodiwirio, S. (2000). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadizya Java.
- Bahtiar. (2009). *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Sinjai Barat*. Sinjai Barat.
- Dazaujak, A. (1996). *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2008). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa.
- Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadiyanto, H. (2004). *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hadiyanto, H. (2013). *Manajemen Peserta*

- Didik Bernuansa Pendidikan Karakter*. Jakarta: Al-Wasath.
- Hamalik, O. (1990). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoko, H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: andi.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, & Moedjiono. (2010). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khaeruddin, & Junaedi, M. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Sekolah*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Koontz, H., & O'Donnel, C. (1972). *Principle of Management: An Analysis of Managerial Function*. Tokyo: McGraw-Hill, Kogakusha Ltd.
- Kosasi, R. (2000). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2008). *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. (2003). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sabri, A. (2000). *Administrasi Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Sallis, E. (2007). *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Shaleh, A. R. (2004). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N. (2008). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sumiati, & Asra. (2007). *Metode Pembelajaran*. CV Wacana Prima.
- Syaefudin, Sa'ud, U., & Makmun, A. S. (2005). *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syamsi, I. (1994). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisa Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Usman, H. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2008). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, C. (1988). *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, C. F. (2006). *Potret Madrasah dalam Media Massa*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.